



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Kompleksitas Pemerintahan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah *Via Website*

Sophi Dezalinda, Mayar Afriyenti*

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

*Alamat e-mail corresponding author: sophidezalinda@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Tanggal Submit 16 Maret 2023

Tanggal revisi 26 Maret 2023

Tanggal Accepted 26 Maret 2023

Key words:

Regional Expenditure, Government Complexity, Regional Original Revenue, Transparency

DOI:

10.36805/akuntansi.v8i1.4757

Open access under Creative
Common Attribution-ShareAlike
(CC-BY-SA)



ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence of the effect of regional original income, regional spending and government complexity on the transparency of regional financial information via websites in Indonesia. This study examines the transparency of financial information on the websites of 84 provincial governments in Indonesia based on the availability and accessibility of this information. This study was tested using 2 methods, namely the regression method for availability and the multiple regression method for the accessibility of financial information on the provincial government website. According to the findings of this study, regional own-source revenues have a beneficial and sizeable impact on financial transparency. Meanwhile, regional spending and government complexity have no effect on the transparency of the regional financial data website. The findings of this study reinforce the agency theory, namely that high local revenue indicates the government's success in carrying out its duties and responsibilities to the community. This research can help the government by providing quantitative empirical evidence about the effect of local original income on the transparency of regional financial information through websites, thereby enabling the government to be more open with other financial information.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah dan kompleksitas pemerintahan terhadap transparansi informasi keuangan daerah via website di Indonesia. Penelitian ini mengkaji transparansi informasi keuangan pada website 84 pemerintah provinsi di Indonesia berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi tersebut. Penelitian ini diuji dengan menggunakan 2 metode yaitu metode regresi untuk ketersediaan dan metode regresi berganda untuk aksesibilitas informasi keuangan pada website pemprov. Menurut temuan penelitian ini, pendapatan asli daerah memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap transparansi keuangan. Sedangkan belanja daerah dan kompleksitas pemerintahan tidak berpengaruh terhadap transparansi website data keuangan daerah. Temuan penelitian ini menguatkan teori keagenan, yaitu bahwa pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dengan memberikan bukti empiris kuantitatif tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap transparansi informasi keuangan daerah melalui website, sehingga memungkinkan pemerintah untuk lebih terbuka dengan informasi keuangan lainnya.

1. Pendahuluan

Isu kunci dalam pemerintahan yang demokratis adalah transparansi. Akuntabilitas kepada publik diperlukan untuk pemerintahan yang demokratis guna mendorong keterbukaan dalam pengungkapan data anggaran dan keuangan yang lebih banyak. Publisitas transparansi

sangat penting dalam rangka fungsi pengawasan, pencegahan tindakan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang dapat menimbulkan hambatan dalam menjalankan pemerintahan. Berkurangnya minat dalam urusan kehidupan politik dan administrasi berakar pada warga di Portugis yang merasa jauh dan sering dikucilkan dari proses, dengan pembuatan kebijakan dikompromikan oleh kabut transparansi yang rendah, maladministrasi atau korupsi. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan warga terhadap lembaga pemerintah, menjadi tidak mau menerima tindakan yang dilakukan jika tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan nyata masyarakat (Da Cru *et al*, 2015). Hal serupa juga ditekankan oleh Albalade de sol (2013), dengan alasan bahwa warga sering mengaitkan masalah politik dan administrasi dengan kerahasiaan dan ketidakjelasan. Ini yang menyebabkan pentingnya transparansi pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses jalannya pemerintahan.

Demi kepentingan transparansi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14 Tahun 2008, yang mewajibkan seluruh badan publik, termasuk pemerintah daerah, untuk mempublikasikan informasi publik tentang segala kegiatan secara berkesinambungan kepada khalayak yang lebih luas. secara teratur dan akurat, baik melalui media elektronik maupun non elektronik. Undang-undang juga mengatur bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk yang mudah diakses dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Sejauh ini masing-masing pemerintah provinsi di Indonesia telah memiliki laman resmi. Namun, pemerintah belum memanfaatkannya secara maksimal. Hal ini terlihat dari data survei yang diperoleh pada laman layanan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020 tentang penggunaan portal website yang dimanfaatkan oleh seluruh pemerintahan di Indonesia sebagai perwujudan *e-government*. Indonesia menempati peringkat ke-88 dari 193 negara dalam hal penggunaan portal resmi pemerintah, dan ke-57 dalam hal partisipasi publik dalam permintaan informasi publik.

Pemerintah daerah di Indonesia saat ini sangat bervariasi dalam jumlah informasi keuangan yang mereka publikasikan secara online, dari yang paling sederhana hingga yang paling detail. Beberapa penelitian, termasuk penelitian tahun 2018 oleh Annisa, Rifka, dan Henny Murtin, menunjukkan bahwa sektor publik memiliki sejumlah faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela. Persaingan politik dan opini audit berpengaruh positif terhadap ketersediaan IKD pada model penelitian pertama, dan terkait dengan hasil model penelitian kedua, persaingan politik dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini secara khusus mengkaji pembagian transparansi menjadi dua bagian, yaitu ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan dan analisis sejauh mana transparansi provinsi terhadap informasi yang dipublikasikan di website. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah dan kompleksitas pemerintahan terhadap ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah melalui website (Studi Empiris Pemerintah Provinsi Indonesia Tahun 2019-2021).

Studi ini penting karena pengungkapan informasi keuangan merupakan salah satu komponen tata pemerintahan demokratis yang baik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan dengan baik dan tidak ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kebaruan penelitian adalah transparansi yang dikaji dalam penelitian ini terutama berdasarkan ketersediaan dan keterjangkauan, dan sampel yang digunakan adalah pemerintah provinsi dengan pengamatan selama 3 tahun dengan kriteria sampel yang ditentukan oleh peneliti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Kompleksitas Pemerintahan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah via Website. Penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk membantu pemerintah

dengan memberikan bukti secara empiris kuantitatif tentang pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah dan kompleksitas pemerintahan terhadap transparansi informasi keuangan daerah via website serta membantu pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan transparansi laporan keuangan yang disajikan di laman resmi daerah.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Scott (2015), teori keagenan merupakan pengembangan dari teori yang mempelajari suatu metode kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak yang menyepakati suatu kontrak kerjasama. Dalam perjanjian ini, prinsipal (investor) memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada agen (manajemen) yang mengelola perusahaan. Dengan kata lain, teori keagenan merupakan pengembangan dari suatu teori untuk mengambil keputusan atas nama pemilik perusahaan. Menurut R.A. Supriyono (2018:63), prinsipal dan agen memiliki hubungan kontraktual berdasarkan teori keagenan. Kewenangan manajemen untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi investor dengan tetap mengutamakan kepentingan prinsipal dalam memaksimalkan keuntungan perusahaan guna mengurangi beban, termasuk beban membayar pajak, dengan menghindari perpajakan.

Dalam mengurangi konflik yang terjadi maka yang dibutuhkan monitoring oleh pihak prinsipal terhadap kinerja yang dilakukan pihak agen. Salah satu bentuk monitoring untuk mengurangi biaya agensi adalah transparansi informasi keuangan kepada publik. Untuk mewujudkan transparansi informasi keuangan kepada publik maka pemerintah dapat menyajikan informasi keuangan via internet yakni *website* pemerintah yang bisa dijadikan alat sebagai pengurang konflik keagenan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah via Website

Dalam teori keagenan, dijelaskan bahwa pemerintah bertanggungjawab terhadap masyarakat. Menerbitkan laporan keuangan ialah salah satu wujud dari pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah pada publik. Di dalam laporan keuangan terdapat informasi keuangan yang penting salah satunya yakni informasi mengenai pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri dan menggunakannya untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberi gambaran mengenai bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan programnya dalam periode tertentu. Hal ini menjadi salah satu informasi yang dapat meningkatkan transparansi informasi keuangan daerah via website, baik dari segi ketersediaan maupun aksesibilitasnya.

Pola kemandirian daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah. Hal ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan mekanisme APBD data Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus tersedia secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Agar pemerintah dapat berbicara secara terbuka. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jeckly dan Eka (2014) dan Munoz *et al* (2016). Hipotesis berikut didasarkan pada hal di atas:

H1_a: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah via *website*

H1_b: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah via Website

Berdasarkan teori keagenan, pemerintah bertanggungjawab terhadap masyarakat. Selain pendapatan asli daerah dalam laporan keuangan yang disajikan pemerintah terdapat pula belanja daerah. Belanja daerah termasuk informasi penting yang harus disajikan karena belanja daerah memberikan gambaran terhadap pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan daerah.

Belanja daerah digunakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Semakin tinggi belanja daerah maka semakin tinggi pula tingkat pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Semakin tinggi tingkat pelayanan, semakin besar tanggung jawab pemerintah untuk menyampaikan informasi tentang pelayanan sosial kepada masyarakat secara tidak langsung melalui website dan sarana lainnya. Efisiensi otoritas yang tinggi merupakan tanda pemerintahan yang baik (Christian dalam Ningsih RF, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Kadek, dkk (2015) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis berikut didasarkan pada hal di atas:

H2_a: Belanja daerah berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah via website

H2_b: Belanja daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via website

Pengaruh Kompleksitas Pemerintahan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah via Website

Kompleksitas pemerintahan dihitung menggunakan jumlah penduduk. Sebagai bagian dari kompleksitas pemerintahan, pemda merupakan lembaga publik yang memiliki tanggungjawab kepada masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk pada suatu daerah maka semakin tinggi pula tanggung jawab pemerintah untuk menyajikan informasi kepada masyarakat secara lebih terbuka agar masyarakat tidak mengalami ketidakpercayaan terhadap proses pemerintahan. Hal ini penting untuk mendorong transparansi lebih baik lagi.

Sesuai dengan teori *agency*, informasi yang disediakan oleh pemerintah harus selaras dengan fakta yang sebenarnya terjadi agar terjalin hubungan yang baik dengan para *stakeholder*. Menurut penelitian Kadek, dkk (2015) menyatakan bahwa tingkat kompleksitas pemerintahan yang tinggi mendorong terjadinya asimetri informasi. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Hendriyani (2015). Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3_a: Kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah via website

H3_b: Kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah via website

3. Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan pemerintah daerah provinsi pada tahun 2019-2021 yang telah diaudit oleh BPK. Laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diperoleh dari situs resmi provinsi, statistik BPS, dan LHP BPK.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan *literature review*. Metode dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan laporan keuangan pemerintah provinsi yang telah diaudit oleh BPK tahun 2019-2021. Sedangkan *literature review*

dilakukan dengan cara pengumpulan penelitian terdahulu yang teoritis melalui *website*, dokumen, artikel, buku sumber tertulis dan lainnya tentang topik penelitian.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2021. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel adalah:

1. Laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia yang telah diaudit oleh BPK RI pada tahun 2019-2021.
2. Pemerintah daerah provinsi yang memiliki laman resmi di internet.
3. Tersajinya informasi berupa Neraca dan LRA pada laporan yang dipublikasikan oleh DJPK Kementerian Keuangan.
4. Data yang teridentifikasi sebagai outlier

Berdasarkan kriteia sampel yang ditetapkan, dari 34 provinsi dengan periode pengamatan 3 (tiga) tahun pengamatan secara berturut-turut dari tahun 2019-2021 sehingga total pengamatan sebanyak 84 data pengamatan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah transparansi informasi keuangan daerah via *website*. Dalam penelitian ini transparansi dilihat berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas. Ketersediaan informasi keuangan diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana untuk pemerintah daerah yang menyediakan IKD mendapatkan skor 1, dan yang tidak menyediakan IKD diberi skor 0. Sedangkan untuk pengukuran aksesibilitas dilakukan menggunakan indeks aksesibilitas yang dikembangkan oleh Styles & Tennyson (2007) dengan sejumlah modifikasi yang disesuaikan. Dalam penelitian ini indeks aksesibilitas berjumlah 12 poin.

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ada 3, yaitu pendapatan asli daerah, belanja daerah dan kompleksitas pemerintahan. Pengukuran pendapatan asli daerah merupakan perbandingan jumlah pendapatan asli daerah yang dipungut dengan realisasi anggaran yang diterima secara keseluruhan. Untuk variabel belanja daerah diukur dengan menggunakan logaritma realisasi belanja daerah, sedangkan untuk pengukuran kompleksitas pemerintahan diukur dengan logaritma populasi penduduk (Ningsih RF, 2018).

Metode Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data *output* dengan menggunakan rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtois dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018).

Analisis Induktif

Temuan ini terdiri dari dua model penelitian yaitu analisis regresi logistik dan analisis regresi berganda. Model penelitian pertama adalah regresi logistik digunakan karena variabel terikat berupa variabel *dummy*. Ini untuk menguji ketersediaan informasi keuangan daerah via *website*. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut:

Model I:

$$IKD = \alpha + \beta_1. PAD + \beta_2. BD + \beta_3. KP + e \dots \dots \dots (1)$$

Model kedua penelitian menggunakan analisis regresi berganda. Ini untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas informasi keuangan via *website*. Persamaannya adalah sebagai berikut:

Model II:

$$IKDakses = \alpha + \beta_1. PAD + \beta_2. BD + \beta_3. KP + e \dots \dots \dots (2)$$

4. Hasil dan Pembahasan

Model 1 Analisis Regresi Logistik

Pada model I ini memiliki tiga langkah yaitu, uji kelayakan model, menilai akurasi dan dan model regresi yang dihasilkan.

Uji Kelayakan Model

a. Menilai -2 log likelihood

Semua percobaan yang dilakukan untuk menilai apakah model universal kegagalan data elektronik tersedia (cocok). Model ini memberikan nilai sig sebesar 0,000 yang menunjukkan model yang dibentuk cocok dengan data secara signifikan.

b. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan seberapa besar variansi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai tersebut dapat dilihat dari nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,526 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan sebesar 52,6% oleh variabel independen, sisanya 47,4% dapat dijelaskan oleh variasi variabel lain diluar model penelitian ini.

c. Uji Hosmer and Lemeshow Test

Hosmer and Lemeshow Test digunakan untuk mengevaluasi kelayakan model regresi secara keseluruhan. Nilai Chi-square adalah 5,090 dan nilai Sig sebesar 0,748, Sig lebih besar dari nilai alpha, yang berarti tidak ada perbedaan nyata antara peringkat yang diprediksi dan yang diamati. Ini berarti bahwa model regresi logistik sesuai dengan data yang diamati dan karena itu dianggap dapat diterima.

Menilai Akurasi Model (*Classification Table*)

Menilai akurasi model digunakan untuk melihat seberapa baik prediksi model penelitian yang diperoleh. Menurut prediksi, model yang sempurna *overall percentage* akan memiliki nilai 100%. Dalam temuan memprediksi model dengan benar memiliki nilai cukup baik yaitu sebesar 86,9%.

Model Regresi yang Dihasilkan (*Variables in the Equation*)

Variables in the Equation digunakan untuk mewakili uji koefisien regresi logistik model penelitian. Nilai B menunjukkan koefisien untuk setiap variabel independen yang diuji. Di sisi lain, nilai Exp(B) menunjukkan probabilitas memperoleh informasi keuangan untuk setiap pemerintah.

Tabel 1
Hasil Analisis Koefisien Regresi Logit

								95% C.I.for EXP(B)	
		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)	Lower	Upper
Step 1 ^a	(X1) PAD	19,499	5,318	13,442	1	,000	293859404,197	8735,035	9885861706194,850
	(X2) BD	-3,074	2,779	1,224	1	,269	,046	,000	10,716
	(X3) KP	-,518	1,891	,075	1	,784	,596	,015	24,252
	Constant	37,183	27,057	1,889	1	,169	14070655503087498,000		

Sumber: data diolah, Output SPSS

Model II Analisis Regresi Berganda

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan tiga uji yaitu, uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas menentukan apakah variabel dalam model regresi memiliki distribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai Kolmogorov-Smirnov variabel aksesibilitas adalah 0,092 dengan Sig sebesar 0,073. Data yang digunakan dalam investigasi ini terdistribusi secara normal, seperti yang dapat dinyatakan.

Uji multikolinearitas dirancang untuk menentukan apakah model regresi menemukan hubungan antara variabel independen. Tidak ada hubungan antara variabel independen dalam model regresi yang baik. Nilai VIF masing-masing variabel independen kurang dari 10, dan nilai tolerance lebih dari 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen dalam model regresi, yang menyiratkan bahwa tidak ada perhatian dengan multikolinearitas antara variabel independen.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians antara residual satu pengamatan dengan residual pengamatan lainnya dalam model regresi. Nilai Sig variabel PAD sebesar 0,966, BD sebesar 0,801, dan KP sebesar 0,855. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Sig masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,05. Dengan kata lain, model regresi dalam penelitian ini tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

Evaluasi Hasil Regresi

a. Uji F (Uji Signifikansi Serentak)

Uji F digunakan untuk menentukan apakah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama.

Tabel 2
Hasil uji F

Model		Sum of Squares	DF	Mean Square F	Sig
1	Regression	426,435	3	142,145	25,779
	Residual	441,125	80	5,514	
	Total	867,560	83		

Sumber: data diolah, Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai F adalah 25,779 dan nilai Sig 0,000. Dilihat dari nilai Sig $0,000 < 0,05$, maka sesuai dengan acuan pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa model penelitian diterima.

b. Uji R² (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar variasi dari variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas dalam temuan ini.

Tabel 3
Hasil Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,701 ^a	,492	,472	2,348

Sumber: data diolah, Output SPSS

Merujuk pada tabel diatas membuktikan nilai Adjusted R Square adalah 0,472 artinya variasi variabel dependen sebesar 47,2% yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen, sisanya 52,8% dijelaskan oleh variasi variabel diluar model penelitian ini. Atau secara

keseluruhan variabel PAD, BD dan KP dapat menerangkan prediksi aksesibilitas informasi keuangan daerah via website sebesar 47,2%.

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Undestandardized		Standardized		T	Sig
	Coefficients B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	27,761	12,789			2,171	,033
PAD	18,076	2,566	,830		7,043	,000
BD	-2,206	1,294	-,238		-1,705	,092
KP	,138	1,079	,019		,128	,898

Sumber: data diolah, Output SPSS

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dianalisis secara statistik dengan menggunakan metode analisis regresi logistik dan analisis regresi berganda, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, belanja daerah dan kompleksitas pemerintahan terhadap transparansi informasi keuangan daerah via website. Berikut pembahasan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen:

Berdasarkan temuan variabel yang telah diolah pada persamaan statistik yang menyatakan bahwa variabel PAD memiliki koefisien regresi sebesar 19,499 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 maka hipotesis 1a diterima. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi variabel PAD lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh besar terhadap variabel ketersediaan informasi keuangan melalui website. Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Jeckly dan Eka (2014), Wau dan Ratmono (2015), dan Munoz et al (2016), yang berpendapat bahwa pendapatan daerah berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah di website. Namun temuan penelitian ini berbeda dengan temuan Ningsih RF (2018) yang menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh besar terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Perbedaan hasil dapat dikaitkan dengan perbedaan subjek penelitian ini dengan Ningsih RF (2018).

PAD berpengaruh cukup besar terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah karena nilai signya kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Hasilnya, hipotesis 1b diterima untuk model kajian aksesibilitas informasi keuangan daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Boli'var et al (2013), Verawaty (2017), dan Fawziah (2020) yang menemukan bahwa rasio PAD berdampak besar terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah melalui website.

Belanja daerah memiliki koefisien regresi sebesar -3,074 dan nilai signifikan sebesar 0,269, menurut *Variabel in the equation* Akibatnya, variabel belanja daerah tidak berpengaruh besar terhadap variabel ketersediaan informasi keuangan daerah. Akibatnya, hipotesis 2a ditolak. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Agus Tubels dan Dyah Purwanti (2016) dan Ningsih RF (2018) yang menetapkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh besar terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Penjelasan mengenai hal ini dapat disimpulkan dari masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mengetahui ketersediaan informasi keuangan daerah.

Hipotesis 2b untuk model aksesibilitas informasi keuangan daerah ditolak berdasarkan hasil regresi berganda. Hal ini ditunjukkan dengan nilai sig belanja daerah sebesar 0,092 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel belanja daerah tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Agus Tubels (2016) dan Ningsih RF (2018) yang menetapkan bahwa belanja

daerah tidak berpengaruh besar terhadap ketersediaan informasi keuangan daerah. Penjelasan untuk hal ini dapat disimpulkan dari kenyataan bahwa banyak pemerintah provinsi masih tidak peduli dengan ketersediaan informasi keuangan di website resmi pemerintah provinsi.

Berdasarkan hasil pengujian Tabel *Variable in the Equation*, kompleksitas tata kelola memiliki koefisien regresi sebesar -0,518 dan nilai signifikansi sebesar 0,784. Akibatnya, variabel kompleksitas pemerintahan tidak berpengaruh besar terhadap variabel ketersediaan informasi keuangan daerah. Akibatnya, hipotesis 3a ditolak. Temuan penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian oleh Hendriyani & Afrizal (2015) yang menyimpulkan bahwa aksesibilitas informasi keuangan daerah dipengaruhi secara signifikan oleh kompleksitas pemerintahan. Temuan penelitian ini konsisten dengan studi oleh Naopal et al. (2017) dan Ningsih RF (2018) yang menyimpulkan bahwa ketersediaan informasi keuangan daerah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kompleksitas struktur pemerintahan.

Berdasarkan temuan analisis regresi berganda, hipotesis 3b dikesampingkan karena nilai sig kompleksitas pemerintahan lebih tinggi dari 0,05, atau 0,898. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa variabel kompleksitas pemerintahan tidak ada hubungannya dengan ketersediaan data keuangan daerah. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Dewi dan Priyo (2019) dan Lestari dan Shiddiq (2019) (2020).

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pendapatan asli daerah, belanja daerah dan kompleksitas pemerintahan terhadap transparansi informasi keuangan daerah via website (Studi empiris pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2019-2021). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Temuan pengujian model satu menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah melalui website, sedangkan variabel BD dan KP tidak berpengaruh.

Hasil perbandingan model kedua dengan menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa PAD memiliki dampak positif yang cukup besar terhadap kemampuan website dalam menyediakan akses data keuangan daerah, namun BD dan KP tidak berdampak.

Daftar Pustaka

- Annisa, Rifka dan Murtini, Henny. 2018. *The Determinant of Regional Financial Information Transparency*. Accounting Analysis Journal, 7(1) (2018) 43-51.
- Boli'var, Manuel., Munoz, L.A., & Hernandez, Antonio. 2013. *Determinants of Financial Transparency in Government*. International Public Management Journal, 16:4, 557-602.
- Da cruz, N.F., Tavares, A.F., Marques, R.C., Jorge, S., & Sousa, L. 2015. *Measuring Local Government Transparency*. Public Management Review.
- Dewi, Viona dan Adi, Priyo. 2019. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk dan Opini Audit terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah*. International Journal of Social Science and Business, Vol. 3, No. 4, Hal. 358-366.
- Fawziah, Intan Nurbaiti. 2020. *Pengaruh Pendapatan Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Rasio Pembiayaan Utang Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 2, No. 1, Seri B, Hal. 2200-2213.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guillamon, Maria-Dolores., Bastida, Francisco., & Benito, Bernardino. 2011. *The Determinants of Local Governments Financial Transparency*. Local Government Studies, 37: 4, Hal. 391-406.

- Hehanussa, Salomi J. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*. 2nd Cbam Vol. 2, No. 1, Hal. 82-91.
- Hendriyani, Ririn., dan Tahar, Afrizal. 2015. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Hal. 25-33.
- Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN Pasal 3 Ayat 3*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Ayat 18*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah*.
- Ingram, R. W. 1984. *Economics Incentives and The Choice of State Government Accounting Practices*. Journal of Accounting Research. Volume 22 (1), Pages 126-144.
- Jaya, Jeckly Darma dan Eka Ardhani. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah Melalui Situs Resmi Pemerintah Provinsi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Bali: Universitas Udayana, Hal. 162-179.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. 2005. *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. Journal of Accounting and Public Policy.
- Lestari, Ekra Puji dan Rahardjo, Shiddiq Nur. *Determinan Transparansi Informasi Keuangan Pada Laman Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2018*. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 9 (3), Hal. 1-13.
- Munoz, L.A., Boli'var, Manuel., and Hernandez, Antonio. 2016. *Transparency in Governments: A Meta-Analytic Review of Incentives for Digital Versus Hard-Copy Public Financial Disclosures*. American Review of Public Administration, Hal. 1-34.
- Nainggolan, Agus Tubels dan Dyah Purwanti. 2016. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website*. Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung.
- Naopal, Fikrinah., Rahayu, Sri., dan Yudowati, S.P. 2017. *Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit dan Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Assets, Vol. 7, No. 1: 56-68.
- Ningsih, Resti Febriya. 2018. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah via Website (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2015)*. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang. Sumatera Barat.
- Pratama, Kadek Aris Dwi., Desak Nyoman Sri Werastuti & Edy Sujana. 2015. *Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3, No. 1 Tahun 2015.
- Styles, A. & Tennyson, M. 2007. *The accessibility of financial reporting of US municipalities on the internet*. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, Vol. 19 No. 1, pp.56-92.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edisi cetakan ke 26. Bandung. Alfabeta.

- Verawaty. 2017. *Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui E-Government Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan*. Akuisisi Journal of Accounting & Finance, Vol. 13 (2), P 92-107.
- Wau, Ikhlas dan Ratmono. 2015. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan keteraksesan internet financial reporting oleh pemerintah daerah*. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 4, No. 4, Hal. 1-12.
- Yao Krah, Dornudo & Gerard Mertens. 2020. *Transparency in Local Governments: Patterns and Practics of Twenty-first Century*. State and Local Government Review, Vol. 52 (3) 200-213.